

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari Implementasi kebijakan pembentukan Polisi Pamong Praja Desa Pada Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan 4 indikator antara lain 1). Kondisi Lingkungan. 2). Hubungan antarorganisasi. 3). Sumberdaya Organisasi. 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Kebijakan pembentukan Sat Polxisi Pamong Praja Desa (Pol PP Desa) di Kabupaten Empat Lawang sebagai implementasi dari desentralisasi terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas, khususnya pembegalan dan pencurian kendaraan bermotor. Penurunan angka kriminalitas hingga lebih dari 90% di beberapa wilayah menunjukkan keberhasilan pendekatan keamanan berbasis komunitas. Keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh sinergi antara Pol PP Desa, aparat desa, kepolisian, dan TNI, serta dukungan dari masyarakat. Faktor-faktor utama yang mendukung efektivitas kebijakan ini meliputi:

1. Koordinasi antar lembaga yang baik,
2. Pelatihan dan pengembangan kapasitas personel yang berkelanjutan,
3. Tingginya komitmen dan akuntabilitas agen pelaksana.

Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional masih menjadi tantangan di daerah yang memiliki kondisi geografis sulit. Oleh karena itu, peningkatan dukungan terhadap sumber daya sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan kebijakan.

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penambahan Personel dan Sarana Operasional:

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang perlu menambah jumlah personel Pol PP Desa terutama di wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dan akses geografis yang sulit.

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang:

Perlu disediakan alat komunikasi, dan pos keamanan permanen untuk mendukung tugas pengamanan di lapangan.

3. Peningkatan Pelatihan:

Diperlukan pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya mencakup teknis pengamanan, tetapi juga penguatan mental, etika pelayanan, dan kemampuan sosial.

4. Penguatan Koordinasi:

Perlu terus ditingkatkan sinergi antara Pol PP Desa dengan Polres, TNI, dan perangkat desa untuk menciptakan sistem pengamanan desa yang responsif dan integratif.

5. Evaluasi Berkala:

Pemerintah daerah sebaiknya melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja Pol PP Desa untuk memastikan efektivitas kebijakan dan menyesuaikan strategi berdasarkan dinamika sosial yang berkembang.